

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan pada umumnya adalah merupakan proses perubahan struktural dalam bidang sosial ekonomi. Proses perubahan tersebut haruslah bersifat dinamis dan menuju pada suatu keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. Dalam proses perubahan struktural di bidang sosial ekonomi ini secara konseptual terlihat lima kelompok variabel sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia
2. Sumber Daya Alam
3. Sumber Daya Modal
4. Teknologi, dan
5. Kelembagaan.

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah digariskan dalam GBHN yang bertujuan meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan yang adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan berikutnya. Untuk mewujudkan hal itu, sasaran kebijakan yang ditempuh pemerintah dalam jangka panjang akan lebih dititikberatkan pada pembangunan ekonomi antara lain di bidang teknologi. Pembangunan di bidang teknologi ini sangat didominasi oleh peran tenaga listrik. Maka, strategi pembangunan ketenagalistrikan yang jelas dan terarah kiranya akan memberikan manfaat yang besar.

Pembangunan ketenagalistrikan adalah bagian integral dari pembangunan nasional, dalam makna kuantitatif dan kualitatif memiliki sifat multi dimensi yang meliputi semua bidang dalam aspek kehidupan dan kepentingan masyarakat banyak. Pembangunan ketenagalistrikan nasional dikembangkan sesuai dengan kebutuhan setempat. Dengan pola ini diharapkan keterpaduan, keselarasan dan keseimbangan pembangunan dapat dicapai secara objektif.

PT PLN atau Perusahaan Listrik Negara merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyediaan energi listrik di Indonesia. Pada awalnya PT PLN ditetapkan sebagai pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan. Namun sejak tahun 1992, pemerintah memberikan kesempatan pada sektor swasta untuk bergerak dalam bisnis penyediaan tenaga listrik. Oleh karena itu, Bulan Juni 1994 PLN dialihkan dari perusahaan umum menjadi perusahaan perseroan (persero), sehingga nama perusahaan ini menjadi PT PLN (Persero).

Tujuan dari pembangunan PT PLN (Persero) tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 54 tahun 1981 yaitu

Ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang perusahaan tenaga listrik dengan maksud untuk mempertinggi derajat kehidupan masyarakat Indonesia.

Namun tujuan pembangunan PT PLN (Persero) tersebut disempurnakan dengan ditetapkannya Undang-undang nomor 15 tahun 1985 tentang ketenagalistrikan menjadi :

Mengusahakan penyediaan tenaga listrik dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dengan mengusahakan keuntungan sehingga dapat membiayai perkembangan

penyediaan tenaga listrik untuk melayani kebutuhan masyarakat dan menjadi perintis kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik.

Pembangunan PT PLN (Persero) tidak semata-mata dimaksudkan untuk mencari keuntungan laba semaksimal mungkin, tetapi cenderung untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan PT PLN (Persero) tetap berjalan walaupun menggunakan biaya yang sangat mahal. PT PLN (Persero) harus menempatkan diri seimbang di antara dua kepentingan yang dominan, yaitu:

1. Sebagai perusahaan, PT PLN (Persero) secara berkesinambungan perlu memperoleh keuntungan ekonomis untuk dapat dan mampu meningkatkan mutu dan jumlah pelayanan listrik untuk umum.
2. Sebagai salah satu komponen pembangunan nasional, PT PLN (Persero) mengemban tugas untuk menyediakan pelayanan tenaga listrik di seluruh wilayah tanah air yang tidak selamanya memberikan keuntungan ekonomis.

Sebagai bentuk pembangunan ketenagalistrikan pada tanggal 17 Januari 2008 PT PLN (Persero) Distribusi Jawa Barat dan Banten berhasil meluncurkan sebuah layanan produk baru yang bernama Listrik Prabayar. Sebuah layanan penjualan tenaga listrik dimana pelanggan membeli terlebih dulu (Prabayar) sejumlah tenaga listrik yang mereka butuhkan, kemudian barulah mereka memanfaatkan listrik yang dibelinya.

Cara ini memberi kesempatan pada pelanggan untuk mengendalikan pemakaian listrik sesuai kebutuhan, sama halnya dengan penggunaan sistem prabayar yang diterapkan oleh operator *telephone celuler (phonecell)* melalui kartu isi ulang (*voucher*). Dengan adanya penerapan listrik prabayar ini

menyebabkan pencatatan pengakuan pendapatan PT PLN (Persero) diakui secara *Cash basic*.

Selama ini PT PLN (Persero) melakukan aktivitas penjualan tenaga listriknya dengan menggunakan sistem pascabayar, yaitu pelanggan mendapatkan layanan listrik dengan cara membayar tagihan listrik untuk daya listrik yang telah digunakan setiap bulannya sehingga PT PLN (Persero) melakukan pencatatan pendapatan secara *Accrual basic*

Kota Bandung merupakan salah satu kota besar yang berada di wilayah distribusi Jawa Barat dan Banten yang memiliki jumlah pelanggan listrik yang cukup besar. Dengan berkembangnya berbagai macam industri, pertokoan, dan bidang usaha lainnya, kebutuhan akan penjualan tenaga listrik di Kota Bandung tentunya semakin meningkat. Kebutuhan akan penjualan tenaga listrik tersebut dilayani oleh PT PLN (Persero) Area Pelayanan Jaringan (APJ) Bandung.

PT PLN (Persero) APJ Bandung patut berbangga diri karena dijadikan proyek percontohan penerapan Listrik Prabayar, dengan pertimbangan bahwa dari segi jaringan / sistem teknologi informasi infrastrukturnya sudah siap dan keberhasilan pelaksanaan *Payment Point Online Bank (PPOB)*.

Penerapan Listrik Prabayar dilayani oleh APJ Bandung yang terdiri dari tujuh Unit Pelayanan Jaringan (UPJ), yaitu:

1. UPJ Bandung Selatan
2. UPJ Bandung Barat
3. UPJ Bandung Timur
4. UPJ Bandung Utara
5. UPJ Cijawura
6. UPJ Ujung Berung
7. UPJ Kopo

UPJ tersebut melayani berbagai pelanggan PT PLN (Persero) APJ Bandung yang didasarkan pada golongan tarif, secara garis besar terdiri dari golongan sosial, rumah tangga, usaha, industri, dan umum. Setiap golongan pelanggan tersebut dibagi lagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan daya yang dimilikinya.

Menurut Dirut PT PLN (Persero), Eddie Widiono mengatakan, sasaran utama penawaran penjualan tenaga listrik dengan sistem Prabayar adalah pelanggan rumah tangga. Jumlah pelanggan rumah tangga sekitar 98 persen dari total 36 juta pelanggan PT PLN (Persero) posisi Januari 2008. Mereka mengkonsumsi sekitar 41,7 persen dari total penjualan tenaga listrik PT PLN (Persero) (dimuat dalam Energi : 46, Januari 2008) .

Menurut Tulus Abadi, pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, dalam menanggapi peluncuran listrik Prabayar, menekankan perlunya PT PLN (Persero) bertindak *fair* dan tegas. Apakah itu diadakan untuk meningkatkan pelayanan atau justru meningkatkan pendapatan. "Kalau untuk

meningkatkan pelayanan, kita harus apresiasi”. (dimuat dalam Energi : 42, Januari 2008).

Sebagai proyek percontohan, sejumlah pelanggan telah bergabung dalam pemakaian listrik Prabayar. PT PLN (Persero) APJ Bandung sendiri menargetkan 1.000 unit terpasang hingga akhir kuartal I 2008. Pada tahap awal, baru pelanggan golongan rumah tangga dengan tipe daya R₁ (450 va – 2200 va) saja yang menikmati layanan tersebut.

Bagi pelanggan yang ingin menikmati layanan sistem listrik Prabayar, PT PLN (Persero) APJ Bandung menerapkan tiga model pemasangan listrik yaitu Pemasangan baru, Mutasi dari sistem pascabayar ke sistem Prabayar, dan Perubahan daya. Untuk masing-masing model pemasangan dikenakan biaya tergantung besaran daya listrik yang digunakan.

Berdasarkan data yang terlihat pada tabel 1.1, jumlah pelanggan golongan rumah tangga yang melakukan mutasi dari sistem listrik pascabayar ke sistem listrik Prabayar pada PT PLN (Persero) APJ Bandung cenderung mengalami peningkatan. Hal ini tentunya sangat diharapkan oleh PT PLN (Persero) APJ Bandung terlebih lagi karena dengan adanya perubahan sistem ini dapat memberikan manfaat yang sangat besar bagi pelanggan maupun PT PLN (Persero) APJ Bandung sendiri.

Tabel 1.1
Jumlah Pelanggan Mutasi Dari Sistem Pascabayar Ke Sistem
Prabayar Per Bulan
Status Tanggal 26 Mei 2009 Jam 12:30 WIB

No.	Bulan	Jumlah Pelanggan						
		Selatan	Barat	Utara	Timur	Cijawura	Ujung Berung	Kopo
1	1-Jan-08	7	5	4	4	5	5	4
2	1-Feb-08	2	-	3	2	3	3	2
3	1-Mar-08	-	-	-	-	-	-	1
4	1-Apr-08	4	4	4	-	5	5	7
5	1-May-08	1	-	-	1	-	2	-
6	1-Jun-08	18	61	3	14	16	1	-
7	1-Jul-08	96	40	113	69	28	74	22
8	1-Aug-08	45	13	28	68	82	72	99
9	1-Sep-08	150	62	151	151	97	200	63
10	1-Oct-08	19	59	8	8	-	5	39
11	1-Nov-08	190	64	49	89	186	378	129
12	1-Dec-08	119	24	298	194	274	329	94
13	1-Jan-09	42	30	1	95	47	85	78
14	1-Feb-09	34	-	22	15	21	10	24
15	1-Mar-09	73	15	64	27	56	120	29
16	1-Apr-09	119	14	138	74	58	241	163
17	1-May-09	102	20	110	73	155	269	105
	TOTAL	1,021	411	996	884	1,033	1,799	859

Sumber: PT PLN (Persero) APJ Bandung (diolah kembali)

Bagi pelanggan pengguna listrik prabayar ketersediaan pasokan listrik yang dimiliki menjadi sangat penting mengingat jika ketersediaan listrik habis, menyebabkan listrik menjadi padam sehingga mengganggu berbagai aktivitas. Untuk dapat menghidupkannya kembali, pelanggan harus melakukan transaksi pembelian listrik prabayar. Sehingga penjualan listrik prabayar bisa terjadi setiap saat tergantung kondisi ketersediaan listrik yang dimiliki. Hal ini tentu sangat berbeda dengan penjualan listrik pascabayar dimana pelanggan membayar tagihan atas penggunaan listrik setiap bulannya.

Berdasarkan uraian tersebut dan untuk mengetahui penjualan tenaga listrik golongan rumah tangga dengan sistem pascabayar dan Prabayar, maka penelitian ini berjudul **“Analisis Perbedaan Penjualan Tenaga Listrik Golongan Rumah Tangga R₁ Dengan Sistem Pascabayar dan Prabayar Pada PT PLN (Persero) APJ Bandung”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penjualan tenaga listrik golongan rumah tangga R₁ dengan sistem pascabayar pada PT PLN (Persero) APJ Bandung.
2. Bagaimana penjualan tenaga listrik golongan rumah tangga R₁ dengan sistem prabayar pada PT PLN (Persero) APJ Bandung.
3. Adakah perbedaan penjualan tenaga listrik golongan rumah tangga R₁ dengan sistem pascabayar dan prabayar pada PT PLN (Persero) APJ Bandung.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penelitian ini adalah ingin mempelajari dan mengkaji bagaimana penjualan tenaga listrik golongan rumah tangga R₁ dengan sistem pascabayar dan prabayar pada PT PLN (Persero) APJ Bandung. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui penjualan tenaga listrik golongan rumah tangga R₁ dengan sistem pascabayar pada PT PLN (Persero) APJ Bandung.
2. Mengetahui penjualan tenaga listrik golongan rumah tangga R₁ dengan sistem prabayar pada PT PLN (Persero) APJ Bandung.
3. Mengetahui perbedaan penjualan tenaga listrik golongan rumah tangga R₁ dengan sistem pascabayar dan prabayar pada PT PLN (Persero) APJ Bandung.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Bagi PT PLN (Persero) APJ Bandung hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai kebijakan penerapan sistem listrik prabayar.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan dan perkembangan dalam ilmu akuntansi khususnya ilmu akuntansi keuangan, akuntansi biaya dan akuntansi manajemen.